

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Tanah merupakan bagian yang penting dari sekian sumber daya alam yang terkandung di bumi ini. Tanah juga merupakan tempat untuk manusia tinggal. Semakin berjalannya waktu, persaingan dan perselisihan untuk menguasai tanah menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia.

Karena pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia, maka tanah harus menjadi salah satu wadah untuk mencapai kesejahteraan bagi kehidupan bangsa.

Hal ini diatur di Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan bahwa:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Realisasi dari Pasal 33 ayat (3) tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Salah satu tujuan pembentukan UUPA adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mewujudkan kepastian hukum, maka diselenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia.

Dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

Ketentuan tersebut di atas merupakan keharusan dan kewajiban bagi Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah. Demi kepastian hukum pemerintah akan mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹

Pendaftaran tanah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pendaftaran tanah yang bersifat *recht cadaster* yang kegiatannya meliputi²:

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak.
3. Pemberian surat tanda bukti hak.

Peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan tersebut dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan Peraturan Pelaksana Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

¹Bachtar Effendie.,1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*,Penerbit Alumni,Bandung,hlm.9

²A.P.Parlindungan.,1990,*Pendaftaran Tanah di Indonesia*,Penerbit Mandar Maju,Bandung,hlm.8

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 yang menentukan bahwa :

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Berdasarkan ketentuan yang diatas, pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang rutin dan teratur yang dilakukan oleh pemerintah dengan meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Disamping itu, UUPA juga mengatur ketentuan yang ditujukan kepada pemegang hak atas tanah salah satunya hak milik.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan bahwa :

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat pasal 6.

Turun temurun yang artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya

sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus dan merupakan suatu induk bagi hak atas tanah yang lain serta tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain. Terpenuhi artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas apabila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.

Mengingat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Hal ini berarti bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan digunakan (atau tidak digunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi, dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat luas diutamakan. Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Sehingga antara kepentingan masyarakat luas dengan perseorangan dapat seimbang.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa:

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) mengatur tentang hak milik, dalam setiap pembebanannya, peralihan serta hapusnya hak milik harus didaftarkan menurut ketentuan yang berlaku.

Mengingat Pasal 19 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Jika tidak diwajibkan, maka diadakannya pendaftaran tanah, yang akan memerlukan banyak tenaga, alat, dan biaya itu, tidak akan ada artinya sama sekali.

Salah satu bentuk untuk meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam mewujudkan kepastian hukum, maka pemerintah membuat suatu program yaitu PRONA. Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Proyek Operasi Nasional Agraria bertugas :

- a. Memproses pensertipikatan tanah secara massal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan bagi

segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah.

- b. Menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis

Dalam rangka pendaftaran tanah dan untuk membantu masyarakat yang berhak atas tanah dalam memperoleh tanda bukti hak atas tanahnya yang terletak dalam satu wilayah administrasi Desa/ Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya, dan untuk mempercepat penyelesaian pensertipikatan tanah, maka perlu dilaksanakan Program Nasional Agraria (PRONA) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang PRONA.

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (Prona) di beberapa daerah masih terdapat kendala, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Nasional Agraria Nomor 4 Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 yang menentukan bahwa :

Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PRONA merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat memperoleh sertifikat tanah yang dilakukan secara massal di suatu Desa / Kelurahan.

Tujuan dan sasaran PRONA diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 yang menentukan bahwa :

- (1) Prona bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hak atas tanah.
- (2) Sasaran PRONA adalah seluruh bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PRONA ditujukan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali atas tanah hak milik yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah agar tidak terlalu membebankan masyarakat untuk memperoleh kepastian hak atas tanah. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) sasaran PRONA adalah seluruh tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang.

Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat. Kenyataannya di wilayah Kabupaten Sekadau terdapat beberapa desa yang sudah dilaksanakan PRONA dan terdapat juga beberapa desa lainnya belum dilaksanakan PRONA.

PRONA yang diprogramkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau untuk Tahun Anggaran 2016 hanya 986 bidang yang meliputi 5

Kecamatan dan 9 desa di Kabupaten Sekadau yaitu Kecamatan Sekadau Hilir (Desa Ensalang dan Desa Tapang Semadak), Kecamatan Sekadau Hulu (Desa Tinting Boyok), Kecamatan Nanga Taman (Desa Rirang Jati, Desa Nanga Mentukak, dan Desa Sungai Lawak), Kecamatan Nanga Mahap (Desa Batu Pahat), Kecamatan Belitang (Desa Maboh Permai dan Desa Padak).

Program PRONA ini sangat diharapkan dapat membantu masyarakat Kabupaten Sekadau dalam memperoleh sertipikat hak milik atas tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan PRONA (khususnya tanah Hak Milik) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah dalam pelaksanaan PRONA (khususnya tanah Hak Milik) tersebut telah mewujudkan kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah Hak Milik) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah Hak Milik) di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah mewujudkan kepastian hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pertanahan mengenai Pelaksanaan Program Nasional Agraria (khususnya tanah hak milik) dalam rangka mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Sekadau.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

a) Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah khususnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau dalam memberikan pelayanan pensertipikatan tanah melalui PRONA (khususnya tanah hak milik) agar terwujud kepastian hukum.

b) Pemegang Hak Milik

Memberikan masukan bagi masyarakat khususnya pemegang hak milik atas tanah yang melaksanakan pendaftaran hak milik dalam pemberian sertipikat tanah melalui PRONA untuk menjamin kepastian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis bahwa Permasalahan Hukum / Skripsi yang diteliti merupakan penelitian yang sudah pernah dilakukan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tetapi berbeda lokasi. Hal ini dibuktikan sebagai berikut :

1. Identitas penulis : BIRTHA MAHANANI DIAN UTAMI, Tahun 2015, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta
 - a. Judul Penulisan : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN BANTUL
 - b. Rumusan Masalah : Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum?
 - c. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui Proyek Operasi Nasional Agraria pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum.
 - d. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dari seluruh responden tidak ada responden yang belum menerima sertifikat Hak Milik atas tanah sehingga wujud kepastian hukum telah terlaksana. Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui

PRONA pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul telah mewujudkan kepastian hukum karena seluruh responden (100%) telah menerimasertipikat Hak Milik atas tanah. Pada pelaksanaan pendaftaran Hak Milik atas tanah melalui PRONA tahun 2010 di Kabupaten Bantul sebanyak 3.450 bidang tanah telah terdaftar dan diterbitkan sertipikat.

2. Identitas penulis : Adhitya Fiantoro, Tahun 2015, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta

a. Judul Penulisan : PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK MILIK MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN KULON PROGO

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kabupaten Kulon Progo?
- 2) Apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik melaui Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria di Kabupaten Kulon Progo.

2) Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria tersebut telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kabupaten Kulon Progo.

d. Hasil Penelitian : Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui PRONA ada tahun 2013 di Kabupaten Kulon Progo telah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981. Responden telah memperoleh sertifikat Hak Milik secara bertahap mulai dari bulan Agustus sampai dengan akhir Desember 2013. Kendala dalam pelaksanaan PRONA pada tahun 2013 adalah persyaratan-persyaratan yang tidak lengkap pada awalnya dan Responden yang bertempat tinggal di kecamatan lain sehingga proses menjadi terhambat untuk sementara.

3. Identitas Penulis : Ika Junita Sinaga, Tahun 2014, Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta.

a. Judul Penulisan : PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (KHUSUSNYA TANAH HAK MILIK) DALAM RANGKA UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN BANTUL.

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah Hak Milik) di Kabupaten Bantul?

- 2) Apakah pelaksanaan PRONA(khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul sudah mewujudkan tata tertib administrasi?

c. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) dalam rangka mewujudkan rangka tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul.
- 2) Untuk mengetahui apakah pelaksanaan PRONA (khususnya tanah hak milik) di Kabupaten Bantul telah mewujudkan Tertib administrasi pertanahan.

d. Hasil Penelitian : Dari 40 responden yang telah menerima sertifikat ada 20 orang responden dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum serta dapat dijadikan jaminan hutang di bank. Adapun responden yang belum menerima sertifikat sebanyak 11 orang responden disebabkan oleh kekurangan pengisian data-data mengenai letak penetapan batas-batas tanah maupun data pribadi; pemilik atas tanah tidak di tempat ketika dilaksanakan kegiatan PRONA dan tempat tinggalnya berbeda-beda sehingga kesulitan untuk menghubunginya. Sebagian peserta PRONA yang telah memperoleh sertifikat tanah sebagai bukti yang kuat maka telah mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan sehingga telah mendukung terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Bantul.

F. Batasan Konsep

1. Program Nasional Agraria (PRONA) adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara massal, pada suatu wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015).
2. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).
3. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai data yuridis yang berupa kepastian mengenai subyek hak dan status tanah yang didaftar, dan kepastian mengenai data fisik yang berupa kepastian mengenai obyek hak yaitu letak, batas, dan luas tanah³.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya dan

³Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 19

didukung oleh narasumber yang berkaitan dengan pelaksanaan PRONA Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Sekadau Provinsin Kalimantan Barat.

b. Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

d) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

e) Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

f) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Nasional Agraria

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015
tentang PRONA

h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015
tentang PRONA

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah penjelasan bahan hukum primer misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dokumen-dokumen, internet, surat kabar, hasil penelitian, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah melalui PRONA.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2) Wawancara adalah proses mengajukan pertanyaan kepada narasumber sehingga memperoleh jawaban tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah dengan mempelajari, memahami, dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan obyek yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sekadau terdapat 7 kecamatan dan hanya 5 kecamatan yang dilaksanakan kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2016. Dari 5 kecamatan diambil 2 kecamatan secara *random sampling* dan dari masing-masing kecamatan tersebut di ambil satu desa secara *random sampling* yaitu Desa Ensalang dan Desa Rirang Jati.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta PRONA yang berjumlah 180 orang adalah pemegang hak milik atas tanah masyarakat pada Tahun Anggaran 2016 di Desa Ensalang 117 orang dan Desa Rirang Jati 64 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pemegang hak milik atas tanah sebagai peserta PRONA yang diambil 20% dari populasi dan ditentukan secara *random sampling*.

6. Responden dan narasumber

a. Responden adalah pemegang hak milik atas tanah peserta PRONA diambil 20% dari 180 peserta PRONA sehingga berjumlah 35 orang responden yaitu 23 responden dari Desa Ensalang dan 12 orang responden dari Desa Rirang Jati.

b. Narasumber :

- a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau
- b. Kepala Badan Statistik Kabupaten Sekadau
- c. Camat Kecamatan Sekadau Hilir
- d. Camat Kecamatan Nanga Taman
- e. Kepala Desa Ensalang
- f. Kepala Desa Rirang Jati

7. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis/ lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Proses berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah proses berpikir secara induktif yaitu proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁴

⁴ Soeryono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 29

H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi

Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika Penulisan Hukum / Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan Hak Milik, Pendaftaran Tanah, Program Nasional Agraria (PRONA) dan Hasil Peneletian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.